
Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membentuk Warga Negara Bertanggung Jawab

Heri Ginanjar¹, Tina Septiana²

¹Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

² Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Linggauana PGRI Sukabumi

e-mail: ¹ heriginanjar@unlip.ac.id ² tinaseptian03@gmail.com

*Corresponding author: heriginanjar@unlip.ac.id

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 10-03-2025

Revisi: 10-04-2025

Disetujui: 25-04-2025

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh: (1) Terjadinya kemerosotan proses pembelajaran PKn yang menyebabkan para siswa kurang berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar. (2). Kecenderungan para pendidik yang mengajar hanya sebatas menuangkan ilmu tanpa adanya perubahan sikap dan perilaku siswa. (3). Kreativitas model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kalangan guru MTs masih kurang aktif, kreatif dan inovatif. (4). Adanya tuntutan bahwa Pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan mencakup pengembangan *civic intelligence, civic participation and civic responsibility*. Berdasarkan hal itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn Untuk Membentuk Warga Negara Yang Bertanggung Jawab" yang dilakukan MTs Cisarua Girang Sukabumi. Permasalahan yang dianalisis adalah : (1). Pengemasan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MTs Cisarua Girang Sukabumi. (2). Pembiasaan pendidikan demokrasi dan sikap tanggung jawab siswa di lingkungan MTs Cisarua Girang. (3). Metode yang dapat digunakan dalam pendidikan demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewujudkan sikap tanggung jawab siswa MTs Cisarua Girang Sukabumi. (4). Faktor yang menjadi menunjang dan menghambat dalam proses pendidikan demokrasi untuk membentuk sikap tanggung jawab siswa MTs Cisarua Girang Sukabumi. (5) Peran dan upaya yang dilakukan pihak sekolah dan komite sekolah dalam pembiasaan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan data tentang proses pendidikan demokrasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dan aktivitas sekolah melalui hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan bentuk eksploratoris yang bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami keadaan yang terjadi di lapangan, melalui pendidikan demokrasi diharapkan dapat terlaksananya sikap demokratis siswa sehingga terjadi proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif serta

menyenangkan. Hasil penelitian pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga Negara yang bertanggung jawab MTs Cisarugirang Sukabumi menghasilkan proses pembelajaran siswa yang aktif, kreatif dan inovatif dengan menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, dengan konten pendidikan demokrasi adalah persamaan hak dan kewajiban di sekolah. Munculnya sikap keaktifan siswa di sekolah membuat siswa selalu aktif dalam kegiatan sekolah dan dididik untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sebagai wujud bentuk keberhasilan dari proses pendidikan demokrasi yang bertanggung jawab. Rekomendasi penelitian ini diantaranya: (1). Pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn dapat dijadikan solusi alternatif dalam menumbuhkan keaktifan siswa di kelas atau di lingkungan sekolah. (2). Diperlukan kerjasama antara guru, pihak sekolah dan seluruh civitas sekolah untuk dapat melaksanakan pendidikan demokrasi, karena terkait dengan kreativitas guru dan keaktifan sekolah dalam terbentuknya sikap tanggung jawab siswa.

Kata Kunci: Pendidikan Demokrasi, Hak dan Kewajiban, Pembelajaran PKn, sikap tanggung jawab siswa.

ABSTRACT

This research is motivated by: (1) The occurrence of deterioration of the learning process that led to the Civics students are less concentrated in the learning process. (2). The tendency of educators who teach science merely poured without a change in attitude and behavior of students. (3). Citizenship Education learning model of creativity among junior high school teachers are still less active, creative and innovative. (4). Education claims that democracy through civic education that teaches covers the development of civic intelligence, civic participation and civic responsibility. Based on that, the researchers conducted a study entitled "Implementation of Democracy Through Education Learning Civics To Establish Responsible Citizen" is done in MTs Cisarugirang Sukabumi. The problems that were analyzed were: (1). Packaging democratic education through learning Citizenship Education in MTs Cisarugirang Sukabumi. (2). Habituation democratic education and attitudes of students in environmental responsibility MTs Cisarugirang Sukabumi. (3). The method can be used in education Citizenship Education Learning democracy through attitudes to realize the responsibility of the students in MTs Cisarugirang Sukabumi. (4). The factors that support and hinder the education process to form a democratic attitude in the student's responsibility MTs Cisarugirang Sukabumi. (5) The role and efforts in doing the school and the school committee habituation democratic education through Citizenship Education learning to form responsible citizens. To answer these questions used data on democratic education process undertaken during the process of learning and school activities through observation, interviews, documentary studies, and literature. The approach used in this study is a qualitative approach to the case study method with a form of exploratory aimed to reveal and understand the circumstances that occur in the field, through the implementation of democratic education is expected to democratic attitudes of students so that the learning process is active, creative and innovative, and fun. The results of the study of democracy education through Citizenship Education learning to form

responsible citizens in MTs Cisarua Girang Sukabumi generate active student learning, creative and innovative to make the grade as a laboratory of democracy, the educational content of democracy is equal rights and obligations in school. The emergence of active students in school attitudes make the students are always active in school activities and are taught to always be responsible for the act of doing as a form of education shape the success of the democratic process that is responsible. Recommendations of this study include: (1). Education learning democracy through civic education can be used as an alternative solution in the growing involvement of the student in the classroom or in the school environment. (2). Required cooperation between teachers, the school and the entire school community to be able to carry out democratic education, because it is associated with creativity and liveliness school teacher in the formation of attitudes the student's responsibility.

Keywords: Educational Democracy, Rights and Obligations, Learning Civics, responsibility attitudes of students.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar mengajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan diperlukan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan segala tuntunan dan pengajaran yang diterima seseorang dalam membina kepribadian siswa. Kepribadian yang baik adalah kepribadian yang menunjukkan adanya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa merupakan salah satu bentuk dari nilai-nilai demokrasi yang dibelajarkan di sekolah. Demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama di semua negara. Sebagai langkah awal dari pendidikan demokrasi maka pembelajaran pendidikan demokrasi harus dibelajarkan di persekolahan. Sekolah merupakan tonggak dasar penanaman budaya demokrasi bagi generasi penerus bangsa, karena di sekolah mereka bertemu dengan berbagai macam pikiran-pikiran, watak, karakter, budaya, dan agama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam menumbuhkan budaya demokrasi dikalangan pelajar.

Paradigma demokrasi yaitu *“education about, through, and for democracy”* yang mempunyai konsep Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi yaitu suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang. (CIVITAS Internasional, 1996, CISED: 1999, APCEC: 2000, Winatraputra: 2001, 2012 :70).

Paradigma demokrasi diatas menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi bukan hanya sebagai pengetahuan siswa tetapi implementasi dari pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi yang seharusnya dilakukan. Menurut Gandal dan Finn : 1992 (dalam Winatraputra, 2012:72) pendidikan demokrasi sering dianggap sebagai *“....taken for granted or*

ignore”, yaitu demokrasi akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Untuk mengantisipasi pernyataan tersebut maka diharuskan adanya pembelajaran demokrasi yang nyata di persekolahan. Secara instrumental pendidikan demokrasi di persekolahan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3).

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, juga memiliki kekuatan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 UU no. 20 tahun 2003).

Pembelajaran pendidikan demokrasi menurut Winatraputra dapat dibagi menjadi dua yaitu *school based democracy education* yakni pendidikan demokrasi dalam konteks formal atau sekolah dan *society based democracy education* yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Yang lebih ditekankan pada penelitian ini adalah pendidikan demokrasi yang dibelajarkan di sekolah atau *school based democracy education* melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan sebagai wahana pendidikan demokrasi pancasila menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang sangat penting karena mempunyai tujuan *good and smart citizen*, maksudnya adalah warga negara Indonesia harus baik dan cerdas yang secara ajeg memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengolah krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera (Winatraputra :2012).

Pendidikan demokrasi yang dibelajarkan di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dituntut dapat memberikan pemahaman dan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran di persekolahan, seperti yang diungkapkan oleh Nu'man Somantri (dalam Pidato Penghargaan Doktor Honoris Causa) 2011 bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan di abad ke 21 ini harus menjawab tuntutan sebagai kebebasan dan berdemokrasi, liberalisasi dalam kehidupan, kemandirian dalam kelompok, berkembangnya IPTEK dan dorongan ingin terus maju.

Spirit dari tuntutan itu pada intinya adalah sebagai perubahan. Dimana dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan pendidikan demokrasi yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dengan baik. Dengan mengubah gaya mendidik Kewarganegaraan kearah abad 21 yang menfokuskan pada kajian unsur-unsur, isu-isu dan konteks yang berbeda secara berkelanjutan.

Cogan 1998 (dalam Wahab, A dan Sapriya : 2011) merekomendasikan bahwa kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di masa depan harus berlandaskan pada suatu konsep

kewarganegaraan multidimensional sebagai konteks yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan di abad 21.

Maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mencakup pengetahuan saja tetapi lebih menekankan pada keaktifan siswa yang tidak terlepas dari budaya demokrasi yang ada di Indonesia yaitu budaya demokrasi pancasila. Yang mana dengan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menghasilkan siswa yang demokratis karena bahan-bahan ajar, metode mengajar yang digunakan adalah bahan metode mengajar yang demokratis yang berlandaskan Pancasila yang mengacu kepada lima sila pancasila yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dapat dengan jelas bahwa pendidikan demokrasi harus ditanamkan sedini mungkin supaya siswa dapat me Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Pendidikan demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Kab. Sukabumi, karena sesuai dengan hasil observasi di lapangan MTs Cisarua Girang Kab. Sukabumi masih terlihat kurangnya dalam implementasi pendidikan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dan sekolah pada umumnya, padahal adanya fasilitas yang memadai.

Fakta tentang kurangnya sikap demokrasi dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat terlihat pada proses kegiatan belajar mengajar yaitu tidak aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, kurang aktifnya guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan kurang tersedianya media untuk proses pembelajaran. Di samping itu juga dengan adanya ketentuan sekolah yang melarang untuk pembelian Lembar Kerja Siswa maka siswa di MTs Cisarua Girang Kab. Sukabumi hanya mendapatkan materi dari guru saja dengan buku yang terbatas. Disamping itu belum adanya koordinasi yang baik antara siswa dengan guru atau pihak sekolah. Itulah beberapa kasus yang harus dirubah untuk menjadikan proses pembelajaran yang menyenangkan.

Sekolah sebagai tempat untuk proses belajar mengajar yang diharuskan adanya interaksi yang sangat aktif, diharapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan maka tentu pembelajaran demokrasi akan terwujud, siswa akan senantiasa dapat mengemukakan pendapat dan menikmati proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena hakikat dari pendidikan adalah memberikan rasa nyaman dalam proses pembelajaran dan menghilangkan rasa takut terhadap guru. Siswa dapat mengekspresikan kemampuan belajar siswa berawal dari berkomunikasi dengan guru, semangat dalam pembelajaran dan akhirnya mempunyai sikap demokratis dan bertanggung jawab.

Mata pelajaran yang menjadi wadah dari pendidikan demokrasi adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan mencakup pengembangan *civic intelligence*, *civic participation* and *civic responsibility*. *Civic intelligence* menyangkut pengetahuan siswa tentang pendidikan demokrasi, *civic participation* menyangkut keikutsertaan siswa dalam pendidikan demokrasi dan *civic responsibility* menyangkut rasa tanggung jawab siswa terhadap sikap yang diambil. Salah satu cara penerapan pendidikan demokrasi adalah terwujudnya kelas sebagai *Laboratorium democracy*. Menurut Winatraputra dan Sapriya bahwa kelas PKn seyogiannya dilihat dan diperlakukan,

sebagai “..Laboratorium for democracy.....is acquired and learned”. Dengan kelas dijadikan sebagai laboratorium demokrasi maka dapat terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi. Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan maka pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Pembelajaran demokrasi diawali dengan pemberian pengetahuan materi demokrasi yang nantinya harus dapat di implementasikan serta menghasilkan sikap rasa tanggung jawab karena tanggung jawab merupakan sikap seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang harus di lakukan.

Implementasi pendidikan demokrasi yang diterapkan di MTs Cisarua Girang Kab. Sukabumi ini sebagai wujud dari pengimplementasian pendidikan demokrasi yang diterapkan di sekolah. Pendidikan demokrasi yang dibelajarkan kepada siswa untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang secara global sebenarnya pembelajaran yang seharusnya dilakukan di setiap persekolahan sehingga mutu dari sekolah tersebut menjadi baik. Siswa dapat menggunakan haknya yaitu kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Maka dari latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji mengenai Implementasi Pendidikan demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dengan studi kasus eksploratoris di MTs Cisarua Girang Kab. Sukabumi Kabupaten Bandung sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah Memberikan gambaran terhadap pencapaian tujuan yaitu tercapainya Implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, sikap tanggung jawab siswa sebagai sikap karakter bangsa tumbuh seiring dengan pengetahuan pembelajaran demokrasi di sekolah dengan menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di MTs Cisarua Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Profil guru yang demokratis tidak bisa terwujud dengan sendirinya tetapi membutuhkan proses pembelajaran. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Dengan implementasi pendidikan demokrasi maka siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Selain itu pembiasaan yang di lakukan dengan baik di sekolah dan di rumah dapat menjadikan siswa tidak hanya mengetahui tetapi melaksanakan budaya demokrasi yang bertanggung jawab.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep Demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa latin yaitu “demos” dan “cratein” atau “cratos”, kemudian di serap ke dalam bahasa Inggris “democracy”. Di dalam “The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, dkk:261) dikemukakan bahwa democracy itu adalah:

- (1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representative,
- (2) country with government which encourages and allows right of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the right of minorities.
- (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”.

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 3 Nomor: 1 (April: 2025) hal: 57-79

Bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil yang dipilih, pemerintahannya mendorong dan menjamin keerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakan rule of law, adanya pemerintah mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberikan perlakuan yang sama.

Praktis demokrasi adalah perwujudan konsep, prinsip dan nilai demokrasi secara kontekstual yang melibatkan individu dan masyarakat dengan keseluruhan aspek yang ada di lingkungannya. Sejak konsep demokrasi dirintis dan dipraktikan di negara kota Athena dalam bentuk demokrasi langsung, kemudian berkembang menjadi demokrasi modern dengan sistem perwakilan yang dimulai dengan Revolusi Prancis pada akhir abad ke 18, dan pada akhirnya menyebar ke seluruh belahan bumi dan diterapkan di masing-masing negara sampai saat ini, praktis demokrasi dimanapun menunjukkan adanya komunitas dan keunikan masing-masing. Salah satu komunitas yang paling menonjol adalah upaya untuk memberikan jaminan pelaksanaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang pokok yakni "life, liberty and property" yaitu hak atas hidup dan kehidupan, hak untuk memperoleh kemerdekaan sebagai individu dan hak untuk memiliki sesuatu dan mendapat jaminan kepemilikan yang didalamnya hak atas kebahagiaan atau kesejahteraan.

Secara konseptual, seperti yang dikemukakan oleh Torres (1998:145-146) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni: "classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine". Dalam tradisi pemikiran Aristoterian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni "...the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship" atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi "medieval theory" yang pada dasarnya menetapkan "Roman law" dan konsep "popular sovereignty" menetapkan "...a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people", atau sebuah landasan yang pelaksanaan kekuasaannya tertinggi dan berada di tangan rakyat. Sedangkan dalam "contemporary doctrine of democracy" konsep "republican" dipandang sebagai "the most genuinely popular form of government", atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni.

Pandangan Mansbridge dalam Participation and democratic theory (Torres, 1998:147) dikatakan bahwa the major function of participation in the teory of partisipation democracy is....an educative one, educative in a very widest sense, yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipasi adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal ini dinilai sangat penting karena seperti diyakini oleh Pateman dalam Torres (1998:147) bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasiwill develop and foster the democratic personality, atau akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis.

Henry B Mayo dalam bukunya yang berjudul "Introduction to Demokrtatic Theory" dalam buku ini merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.

2. Menjamin kan terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi adanya pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum.
5. Mengakui dan menganggap wajar dengan adanya keanekaragaman (diversity).
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Di Indonesia, konsep masyarakat Madani terhitung baru. Menurut Culla 1993, Raharjo 1999 (dalam Budimansyah, D dan Winatraputra, U 2002:228) memandang istilah masyarakat Madani hanyalah salah satu dari berbagai istilah sebagai padanan kata "civil society", karena masih ada beberapa istilah lainnya seperti masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, dan masyarakat berbudaya. Sementara itu, Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (1999a:32) menyarankan untuk menggunakan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari "civil society".

Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Sudarso (dalam Budimansyah, D dan Winatraputra, U 2002:229) civil society atau masyarakat Madani yang baik secara kualitatif ditandai oleh "Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jaminan hak asasi manusia, penegakan "Rule of Law", partisipasi yang luas dari warga negara dalam pengambilan keputusan publik di berbagai tingkatan dan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warga negara indonesia yang baik dan cerdas.

Dilain pihak Hikam dikutip oleh Tilaar (1999:159-160) menekankan adanya empat ciri utama masyarakat madani, yakni "Kesukarelaan, Keswasembadaan, Kemandirian tinggi terhadap negara, dan Keterkaitan kepada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama". Atau secara lebih lengkap ciri masyarakat Madani tersebut dikembalikan kepada ciri masyarakat Madinah pada jaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertuang dalam piagam madinah, seperti disarikan oleh Sukidi (Tilaar 1999:160) dengan sepuluh prinsip yakni : "kebebasan beragama, persaudaraan seagama, persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama, saling membantu, persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara, penegakkan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu, pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan pengakuan hak atas setiap orang atau individu.

Secara khusus Tilaar (1999:156-157) menyatakan "Masyarakat Madani Indonesia yang demokratis justru akan memperoleh dasar perkembangan yang relevan dengan adanya kebhinekaan masyarakat Indonesia yang menekankan bahwa "Kehidupan demokrasi sebagai ciri utama masyarakat madani akan mendapat persemaian yang sempurna didalam corak kebhinekaan masyarakat dan budaya Indonesia".

Yang menjadi ciri khasnya adalah dalam sifatnya yang harus tetap agamis atau religius dan adanya fasilitas yang lebih nyata dari negara, khususnya dalam tiga hal yaitu :

- a. Memberikan jaminan hukum dan dukungan politik bagi kehadiran masyarakat madani.
- b. Memupuk suasana kultural dan ideologis bagi lahir dan tumbuhnya masyarakat madani.

- c. Menyediakan infrastruktur sosial yang diperlukan serta memberikan fasilitas bagi tersedianya infra struktur tersebut.

Nilai Demokrasi

Nilai-nilai dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat egalitarian dibandingkan dengan ideologi non demokrasi. Menurut Dahl (dalam Cecep Darmawan, 2009) menyatakan bahwa terdapat sepuluh keuntungan pelaksanaan demokrasi sebagai berikut:

1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah HAM yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan yang lebih luas bagi warga negaranya.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasannya untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka tentukan dan konsekuensikan sendiri.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total.
8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara-negara demokratis yang konsekuen terhadap kedemokratisannya cenderung lebih makmur daripada Negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut maka perlu diselenggarakan lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintah yang bertanggung jawab.
2. Lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah.
3. Pembentukan organisasi atau partai politik.
4. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatukan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.
6. Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi yaitu suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi melalui interaksi

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 3 Nomor: 1 (April: 2025) hal: 57-79

sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang. (CIVITAS Internasional, 1996, CICED: 1999, APCEC: 2000, Winatraputra: 2001, 2012 :70).

Menurut Gandal dan Finn :1992 (dalam Budimansyah,D dan Winatraputra,U 2012:231) bukan saja di negara yang sedang berkembang tetapi juga negara yang sudah maju “*education for democracy*” atau pendidikan demokrasi memang dianggap penting, tetapi dalam kenyataannya sering dianggap enteng atau bahkan dilupakan. Oleh karena itu ditegaskan oleh Gandal dan Finn bahwa demokrasi tidak bisa diajarkan sendiri. Jika kekuatan, kemanfaatan dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya. Oleh karena itu ditekankan lebih lanjut bahwa “*Education for democracy, therefore, must be approached in a conscious and serious manner*” atau pendidikan demokrasi harus disikapi secara sadar dan bersungguh-sungguh.

Pendidikan menurut Gandal dan Finn bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktek demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, sikap selalu ingin tahu dan berpandangan jauh kedepan. Namun demikian diingatkannya pendidikan demokrasi janganlah hanya dilihat sebagai mata pelajaran yang terisolasi, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, mungkin dalam pelajaran sejarah, kewarganegaraan, etika atau ekonomi dan lebih banyak terjadi di luar sekolah. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum.

Perlu dikembangkan model “*school based democracy education*” paling tidak ada empat alternatif bentuk yaitu : Pertama, landasan atau bentuk-bentuk demokrasi, Kedua, adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi dengan telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik diberbagai belahan bumi dalam kurun waktu. Dengan demikian siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Ketiga, Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi dinegaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan dinegaranya dalam berbagai kurun waktu. Keempat, tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Melalui program pendidikan formal, nonformal dan informal pendidikan demokrasi memerlukan perangkat pengalaman belajar (*learning experiences*), seperti kurikulum atau program belajar dan pembelajaran yang secara programatik dapat memandu terjadinya proses pengembangan cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi dalam diri peserta didik. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk merancang kurikulum dan pembelajaran yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis.

The notions of education for democracy may be classified into the following:

1. *Developing people's capabilities of thoughtful and responsible participation as democratic citizens in various spheres of life.*

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 3 Nomor: 1 (April: 2025) hal: 57-79

2. *Providing a set of core values of democracy or democratic attitudes such as respect for reasonable differences, different viewpoints, and human dignity, respect for minority rights, a caring attitude toward others, justice, equality, participation, freedom as requirements of citizens in order to create a democratic society.*
3. *Teaching how to use the concept of democracy in terms of a form of government especially, a democratic government.*
4. *Making citizens 'political': citizens believe in, commit to, uphold, and carry out fundamental democratic principles and become effective citizens or politically literate. Fachrudin (2005:40)*

Dalam melukiskan pendidikan kewarganegaraan demokratis, memberikan penekanan terhadap poin-poin yang berbeda. Pendidikan untuk demokrasi dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan orang-orang tentang pengertian dan partisipasi yang bertanggung jawab sebagai warga negara demokratis dalam berbagai lapisan kehidupan.
2. Menyediakan satu set nilai-nilai inti demokrasi atau sikap-sikap demokratis seperti penghargaan terhadap latar belakang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan martabat manusia, penghargaan terhadap hak-hak minoritas, kepedulian terhadap yang lain, keadilan, persamaan, partisipasi, kebebasan sebagai prasyarat warga negara untuk menciptakan masyarakat demokratis.
3. pengajaran bagaimana cara menggunakan konsep demokrasi dalam kaitannya dengan bentuk pemerintahan, terutama pemerintahan yang demokratis.
4. Membuat warga negara politis yaitu para warga negara yang percaya akan, berkomitmen terhadap menegakkan, dan membangun prinsip demokrasi fundamental warga negara yang efektif atau warga negara yang melek secara politik. (Dalam Fachruddin. (2005). *duating for Democracy: Ideas and Practices of Islamic Civil Society Association in Indonesia. Dissertation at University of Pittsburgh*).

Sanusi,1998:3 (dalam Budimansyah,D dan Winatraputra,U. 2012:232) menegaskan perlu dikembangkannya berbagai kecerdasan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia, mencakup “kecerdasan krali, kecerdasan naqliyah, kecerdasan aqliyah (otak logis-rasional), kecerdasan emosional (nafsiyah), kecerdasan menimbang (*judgement*), kecerdasan membuat keputusan dan memecahkan masalah, dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikanya”.

Maka dirumuskan visi, misi dan strategi pendidikan demokrasi yang sesungguhnya yaitu sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai-nilai, konsep, prinsip, sikap dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Bermuara dari visi pendidikan demokrasi tersebut maka misi pendidikan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan

dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai.

2. Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praktis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu.
3. Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praktis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

Menurut Alamudi (dalam Darmawan,C. 2009 : 2) menyebutkan bahwa pembinaan demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui pelembagaan dari kebebasan. Nilai terpenting dari pembinaan demokrasi ini adalah persamaan. Hemat kata soko guru demokrasi adalah persamaan dan kebebasan.

Sekolah merupakan sebuah organisasi yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melaksanakan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis, maupun sosial. Dalam pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial.

Demokrasi di sekolah dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh kegiatan di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif, sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Beane dan Apple (1995: 7) dalam Rosyada (2004: 16) mengemukakan bahwa kondisi yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis adalah sebagai berikut:

- 1.Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang dapat menerima informasi seoptimal mungkin.
- 2.Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
- 3.Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, *problem-problem* dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.
- 4.Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik.

5. Kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.

6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia.

7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis

Ciri-ciri organisasi sekolah demokratis, sebagaimana dituliskan Rosyada (2004: 228-289) dari buku karangan Tony Bush (48-50) adalah sebagai berikut:

1. Sangat beorientasi negatif, yakni bahwa manajemen harus didasarkan pada kesepakatan, apapun program yang hendak dikembangkan dan impementasikan harus didasarkan pada kesepakatan, dan tidak hanya menjadi *values* tapi juga sebagai sebuah keyakinan, bahwa model nilai yang terbaik.
2. Pendekatan demokratis sangat layak untuk organisasi dengan para anggota dari kalangan profesional, yakni mereka yang memiliki kemampuan teknis dan keterampilan, mereka memiliki otoritas dalam keahliannya. Organisasi sekolah harus dikelola oleh kalangan-kalangan profesional karena siswa memerlukan pembinaan dan pelayanan dari mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya.
3. Penanaman nilai, kultur dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri, yang sudah dimulai sejak dalam fase pendidikan dan tahun-tahun pertama mereka bekerja.
4. Pengambilan putusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan oleh sebuah komite dan tidak dilakukan secara individual oleh seorang kepala dengan menggunakan otoritas kepimpinannya. Dan semua unsur memiliki wakil dalam komite tersebut, yang harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam komite terhadap konstituennya.
5. Semua putusan ditetapkan dengan cara konsensus atau kompromi dan sedapat mungkin dihindari polarisasi organisasi karena perbedaan pendapat dan pandangan. Perbedaan dalam proses harus diakhiri dengan konsensus atau kompromi, walaupun terkadang harus menghargai kecenderungan masyarakat.

Secara prinsip demokrasi tercipta karena adanya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Keadaan ini menciptakan suasana kesetaraan tanpa sekat-sekat kesukuan, agama, derajat atau status ekonomi. Dengan demikian manusia mempunyai ruang untuk mengekspresikan diri secara bertanggung jawab. Situasi seperti inilah yang seharusnya dibangun dalam dunia pendidikan, anak diajak untuk mengembangkan potensi diri.

Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Di tengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia baru yang lebih demokratis di bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa dan reformatif justru banyak politisi yang berkarakter oportunistis, arogan dan mau menang sendiri, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengembangkan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan, kejujuran, dan keadilan.

Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, misalnya siswa dan guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan kelas, kenyamanan kelas, terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi iklim pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran apapun. Interaksi guru dan siswa bukan sebagai subjek dan objek, melainkan subjek dan subjek yang sama-sama membangun karakter dan jatidiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah studi kasus dengan tipe penelitian eksploratoris, metode studi kasus dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apa bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan *how* atau *why*.

Studi kasus menurut Robert. K.Yin (2002:1) merupakan salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Tipe penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah eksploratoris karena studi kasus yang tunggal yang harus dijabarkan secara deskriptif. Tujuan penganalisis untuk memajukan penjelasan-penjelasan tandingan untuk rangkaian peristiwa yang sama dan menunjukkan bagaimana penjelasan diterapkan pada situasi-situasi yang lain.

Alasan dipilihnya metode penelitian studi kasus dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode penelitian studi kasus merupakan salah satu bentuk metode yang tercakup didalam metodologi penelitian kualitatif.
2. Melalui metode penelitian studi kasus diharapkan dapat memberikan keleluasaan dalam menggunakan beragam teknik pengumpulan data sebagai sarana untuk menjangkau dimensi otentik dari topik yang diteliti.
3. Penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung tentang pendidikan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Digunakan metode penelitian studi kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian, maka peneliti membatasi istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendidikan Demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang.

2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang menekankan pada pendidikan yang berorientasi pada kewarganegaraan.
3. Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Didalam pengertian modern, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu.
4. Tanggung Jawab merupakan kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab yang menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. Sikap tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang diteliti yaitu Pembinaan Pendidikan Demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk Warga Negara Yang Bertanggung Jawab, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah *Key Instrument* atau alat peneliti utamanya adalah peneliti itu sendiri yang dibantu dengan pedoman observasi atau pedoman wawancara. Lembar observasi dan wawancara digunakan sebagai bahan acuan didalam penelitian.

Peneliti sebagai instrumen kunci (*research as key instrument*) para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui: observasi perilaku, studi dokumentasi atau wawancara dengan para partisipan. Dengan peneliti sebagai *key instrumen* dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi atau data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang dihimpun melalui tiga teknik atau triangulasi teknik pengumpulan data, yang terdiri dari: teknik observasi, teknik wawancara, dan analisis dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan selama dua bulan di MTs Cisarua Girang Sukabumi.

Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati kegiatan proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sekolah di MTs Cisarua Girang Sukabumi dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekolah. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di MTs Cisarua Girang Sukabumi dan lingkungan Sekolah MTs Cisarua Girang Sukabumi.

Untuk mendapatkan informasi yang terperinci tentang pembinaan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga Negara yang bertanggung jawab di MTs Cisarua Girang Sukabumi. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala MTs Cisarua Girang Sukabumi yang di wakili oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang bernama Nanang (48 Tahun) untuk mendapatkan informasi tentang pembiasaan pendidikan demokrasi di lingkungan MTs Cisarua Girang Sukabumi. Wawancara dilakukan

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 3 Nomor: 1 (April: 2025) hal: 57-79

kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Udin (55 Tahun) dan Astuti (53 Tahun), Pembina ekstrakurikuler Awan (55 Tahun), Komite Sekolah Asep (62 Tahun) dan siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi yaitu : Taufik (15 Tahun), Lia (14 Tahun), Joko (14 tahun), Nur (14 Tahun), Lani (14 Tahun), Dinda (14 Tahun), Sofi (14 Tahun), Fazri (15 Tahun), Suci (14 Tahun), Sari (15 Tahun), Siti (14 Tahun), Yani (15 Tahun), Ibnu (15 Tahun), Jaya (15 Tahun), Sofi (14 Tahun) dan Raha (15 Tahun). Seluruh kegiatan wawancara ini dilakukan di sekitar MTs Cisarua Girang Sukabumi.

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan analisis dokumentasi data-data siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi yang didapat dari wakil kepala bidang kurikulum dan data OSIS MTs Cisarua Girang Sukabumi. Analisis dokumentasi ini untuk mendapatkan informasi tentang data-data kegiatan di MTs Cisarua Girang Sukabumi.

Pengemasaan Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dapat diketahui bahwa pengemasaan Pendidikan Demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi belum sepenuhnya dapat dilakukan ini dapat dibuktikan dengan kegiatan pembelajaran di kelas pada saat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengemasaan Pendidikan Demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi, peneliti melakukan wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan Udin (55 Tahun) dan Astuti (53 Tahun) serta lima orang siswa MTs Cisarua Girang Sukabumi yaitu Taufik (15 Tahun), Lia (14 Tahun), Joko (14 Tahun), Nur (14 Tahun) Dan Lani (14 Tahun).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan bahwa persiapan pengemasaan pendidikan demokrasi di MTs Cisarua Girang Sukabumi ini diawali dengan pembelajaran mengenai demokrasi, siswa-siswi diberi pembelajaran dan pemahaman mengenai pendidikan demokrasi seperti adanya materi demokrasi, bagaimana melakukan demokrasi yang baik dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Mengutip pendapat dari Udin (55 tahun) dalam wawancara yang mengungkapkan tentang pengemasaan pembinaan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

.....Pembelajaran pendidikan demokrasi pada jenjang SMP harus dibelajarkan dengan adanya materi pendidikan demokrasi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, materi pendidikan demokrasi dan nilai-nilai demokrasi selalu ada di setiap tingkatan kelas baik kelas VII, VIII, dan IX, dengan standar kompetensi yaitu memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dengan adanya materi pendidikan demokrasi setidaknya siswa-siswi mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian demokrasi dan tinggal bagaimana guru mengerahkan dan membiasakan siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi untuk bersikap demokrasi.....

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pembelajaran pendidikan demokrasi yang diterapkan di MTs Cisarua Girang Sukabumi diawali dengan pemberian materi tentang demokrasi dan nilai-nilai demokrasi, sehingga siswa-siswi dapat memahami dan melaksanakan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Pendapat Udin (55 Tahun) didukung oleh pendapatnya Astuti (53 Tahun) yang menyatakan bahwa pembelajaran siswa SMP harus diberi pemahaman terlebih dahulu setelah itu siswa-siswi SMP dapat dengan mudah diarahkan untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dalam pengemasan demokrasi di kelas.

Astuti (53 Tahun) mengungkapkan pendapatnya dalam wawancara tentang pengemasan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi.

.....di MTs Cisarua Girang Sukabumi ini, pembinaan yang dilakukan harus dibelajarkan terlebih dahulu, untuk pendidikan demokrasi materi dapat disampaikan pada setiap jenjang karena materinya ada dan mempermudah siswa untuk lebih memahami tentang demokrasi,...

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa, pembelajaran nilai-nilai demokrasi dibelajarkan di setiap tingkatan kelas, sehingga untuk menerapkan pembiasaan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan. Namun dari beberapa penjelasan diatas tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, peneliti melihat bahwa pembelajaran demokrasi memang dibelajarkan di kelas karena ada terkandung didalam materi. Namun, nilai-nilai yang terkandung tidak mencerminkan proses pembelajaran demokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Udin (55 Tahun) yang menyebutkan bahwa:

Melihat situasi dan kondisi terkadang materi tidak bisa tersampaikan dengan baik karena siswa terkadang harus mengulang kembali supaya siswa mengerti. Dengan faktor kondisi siswa yang di perkampungan seperti ini budaya malu masih sangat kental ini terbukti ketika siswa-siswi disuruh untuk aktif di kelas mereka malu dan belum terbiasa, maka di pelajaran PKn ini diharapkan setidaknya dapat merubah budaya malu tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa kegiatan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memang belum sepenuhnya dapat diterapkan nilai-nilai demokrasi karena terhambat oleh faktor budaya yaitu budaya malu dan kondisi materi yang belum tersampaikan dan belum terbiasa menggunakan media pembelajaran.

Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat dari siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi yaitu Taufik (15 Tahun), yang menyatakan bahwa:

Selama ini proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi tidak bersikap demokratis walaupun sedang ada materi demokrasinya, namun selama ini hanya mencatat saja.

Pendapat tersebut senada dengan informasi yang diungkapkan oleh Lina (14 Tahun) siswi kelas VIII A, mengungkapkan tentang pengemasan demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

....Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini hanya mencatat saja, jarang sekali kita melakukan diskusi dan mengemukakan pendapat dengan teman. Tekniknya hanya guru datang ke kelas setelah itu langsung mencatat sampai satu jam pelajaran dan satu jam pelajaran lagi dijelaskan oleh guru tersebut...

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa selama ini proses pembelajaran demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidaklah berjalan dengan baik, siswa hanya mengetahui saja pendidikan tentang demokrasi, selebihnya tentang aplikasi siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi tidak menerapkan secara langsung.

Pendapat ada yang sedikit berbeda dari Sofi (14 Tahun), siswi kelas IX F mengungkapkan tentang proses pembelajaran pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

....karena mungkin guru kelas IX berbeda dengan kelas VIII maka di kelas kami terbiasa dengan proses demokrasi yaitu di kelas melakukan diskusi, namun memang kebanyakan kami juga mencatat dan di jelaskan sedikit demi sedikit oleh guru kami. Sebenarnya kami bosan jika harus belajar seperti itu namun itu dari guru yang bersangkutan sudah metodenya seperti itu, saya berharap ke depannya supaya pembelajaran pendidikan demokrasi dapat benar-benar dijalankan di MTs Cisarua Girang Sukabumi ini sehingga memacu untuk bersikap kritis...

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa proses kegiatan belajar mengajar tergantung kepada bagaimana cara guru untuk memberikan materi pembelajaran, selama ini di MTs Cisarua Girang Sukabumi cara pengemasan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belumlah dapat terealisasi dengan baik, selama ini sebagian besar atau hampir sepenuhnya proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi hanya menggunakan metode ceramah bervariasi. Bahkan membuat jenuh para siswa dikelas sehingga proses implementasi pendidikan demokrasi yang seharusnya dilakukan tidak berjalan.

Peneliti bersama guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi bersama-sama mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran secara bervariasi untuk memberikan stimulus kepada siswa-siswi supaya memberikan kesan senang dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. selama dua bulan peneliti melakukan penelitian ternyata membuahkan hasil, siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi setidaknya dengan pemberian materi demokrasi yang menggunakan metode oleh guru Pendidikan Kewarganegaraannya ternyata dapat mengubah pola pikir siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi.

Guru mencoba untuk memberikan stimulus kepada siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi dengan menggunakan metode *student facilitator*, *jigsaw*, *two stay two stray* dan lain-lain. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa diajak untuk menyenangi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terlebih dahulu setelah itu maka siswa dapat mudah diajak untuk memahami materi yang akan disampaikan.

Seperti yang diungkapkan oleh Joko (14 Tahun) siswa kelas VIII A, tentang pengemasan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

.....ternyata materi demokrasi jika diaplikasikan dengan metode pembelajaran sangat asik sekali, kita menjadi tahu bagaimana ternyata proses pemilu tersebut karena kami sejauh ini belum pernah, dengan metode pembelajaran ini, kami menjadi tahu dan faham.....

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa, proses pembelajaran yang dapat menjadikan siswa-siswi paham adalah dengan cara membuat metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif salah satu contohnya adalah dengan simulasi pembelajaran. Siswa diajak untuk memainkan peran bagaimana menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan umum, dan mendidik siswa-siswi supaya dapat menerima dan memberikan pendapat kepada teman sebayanya.

Salah satu contoh proses pembelajaran yang dilakukan adalah simulasi pemilu dengan materi memahami pentingnya demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, siswa diajak untuk mengetahui bagaimana cara proses pemilu legislatif yang akan berlangsung. Siswa diajak untuk membuat kotak suara, kartu pemilu dan tinta yang digunakan dalam pemilu. Dan hasilnya siswa-siswi merasa senang dan paham tentang proses pemilu yang merupakan bagian dari pada proses demokrasi di Indonesia.

Pendapat ini senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Nur (14 Tahun) siswi kelas VIII A yang menyebutkan tentang pengemasan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

....saya sangat senang sekali dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekarang ini, karena lebih paham dan mengerti mengenai materinya, selama ini proses pembelajaran hanyalah mencatat tetapi sudah hampir satu bulan ini pembelajaran di kelas kami menggunakan berbagai metode dan yang paling berkesan adalah simulasi pemilu....

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa, siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi sebenarnya dapat diajak untuk aktif dalam proses pembelajaran itu dapat terbukti dengan adanya stimulus kegiatan belajar kepada siswa-siswi meningkat menjadi lebih baik. Bahkan guru Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya dapat memberikan materi dengan mudahnya karena siswa belajar secara aktif, dan penilaian dapat dilakukan secara objektif.

Seperti yang dikemukakan oleh Udin (55 Tahun) guru Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi, yang menjabarkan bahwa:

.....pendidikan demokrasi di MTs Cisarua Girang Sukabumi ini sebenarnya sudah ada program dari pihak sekolah namun karena situasi dan kondisi mengakibatkan kurangnya partisipasi siswa. Namun kita mencontohkan beberapa metode ternyata pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih mudah diberikan kepada siswa jika dikemas sedemikian rupa dengan sebuah metode sehingga menghasilkan keaktifan siswa di kelas dan kelas dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi yang selama ini diharuskan di persekolahan, apalagi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa inti dari pengemasan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn adalah bagaimana guru sebagai tonggak dalam proses pembelajaran dapat memberikan pengajaran dengan baik sehingga siswa bersikap aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga kelas dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi pada saat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Dari semua pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa pengemasan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn dapat dilakukan dengan menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, di kelas dapat bertukar dan menerima pendapat sehingga siswa-siswi MTs Cisarua Girang Sukabumi dapat bersikap kritis dan kreatif seperti nilai-nilai yang terkandung didalam demokrasi.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan Umum

Pendidikan demokrasi merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan sekolah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh sikap demokratis yang memahami persamaan antara hak dan kewajiban. Dalam pendidikan demokrasi yang dilakukan lebih menggambarkan proses keaktifan siswa sebagai bentuk aktivitas siswa di sekolah. Pendidikan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dilakukan agar keaktifan siswa baik di kelas maupun di lingkungan sekolah dapat terlaksana dengan baik sehingga sekolah dapat dijadikan sebagai laboratorium demokrasi.

Selama ini proses pembelajaran yang diajarkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diwarnai dengan kurangnya aktifitas di kelas sehingga siswa merasa jenuh dan bosan pada saat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kondisi seperti ini menimbulkan keprihatinan dan hal tersebut telah terjadi pengabaian terhadap nilai-nilai mendasar dari pendidikan demokrasi. Faktor yang sangat dirasakan kurang menunjang adanya implementasi pendidikan demokrasi adalah kurangnya aktifitas siswa di kelas sehingga tidak terbentuk kelas sebagai laboratorium demokrasi dan kurangnya keaktifan siswa di lingkungan sekolah. Pola pembelajaran, penanaman nilai demokrasi diharapkan dapat meningkatkan pembudayaan demokrasi di lingkungan sekolah.

Siswa SMP dipandang sebagai siswa yang sudah terbiasa memperoleh sifat-sifat tertentu melalui pengalaman hidupnya yang kritis. Sekolah tempat mencari ilmu yang senantiasa dapat menjadikan siswa bersikap kritis baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, oleh karena itu siswa SMP perlu dibimbing dan diberi pembiasaan yang baik dan terarah agar mampu memahami berbagai hal tentang materi pembelajaran di sekolah khususnya materi demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan demokrasi yang dilakukan pada siswa selama proses pembelajaran di kelas dan di lingkungan sekolah menjadi sangat penting. Pembinaan dengan cara pembiasaan aktivitas demokrasi pada proses belajar mengajar di sekolah guna mengoptimalkan penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Salah satu pembiasaan yang diperlukan dan penting untuk siswa di MTs Cisarua Girang Sukabumi adalah menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Kelas yang dijadikan sebagai laboratorium demokrasi sangat dibutuhkan untuk menunjang perkembangan keaktifan siswa di sekolah. Konsep kelas sebagai laboratorium demokrasi member pemahaman awal bahwa pembelajaran harus melibatkan siswa dan aktivitas demokrasi harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Siswa dapat ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dapat menerapkan sikap disiplin kepada siswa. sekolah menyiapkan kotak kritik dan saran untuk siswa, siswa dapat ikut serta secara langsung dalam memilih ketua OSIS dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati.

Implementasi Pendidikan demokrasi pada siswa SMP juga dapat diterapkan pada lingkungan keluarga. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan dengan orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga di rumah. Adanya pembagian tugas tersebut merupakan salah satu contoh dari penerapan aktivitas demokrasi di lingkungan keluarga, selain itu adanya kebebasan mengemukakan pendapat melatih anggota keluarga untuk selalu menerima dan menerapkan aktivitas demokrasi di lingkungan keluarga.

Menanamkan pendidikan demokrasi kepada siswa yaitu nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan harus jelas, konsisnten, adanya keteladanan dari siswa, adanya rasa kekeluargaan antara guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan antara pihak sekolah, guru, siswa dan komite sekolah agar adanya pembiasaan demokrasi pada siswa, dengan demikian siswa dapat belajar secara kreatif, inovatif dan menyenangkan. Oleh karena itu sangat diperlukan pembiasaan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.

Pendidikan demokrasi bukan hanya sekedar untuk mengejar prestasi akademik semata, melainkan terutama untuk mengaktifkan siswa dan menumbuhkan sikap tanggung jawab siswa di sekolah. Siswa yang memiliki sikap tanggung jawab dapat dikatakan sebagai siswa yang cerdas secara akademik dan tingkah laku.

Kualitas pendidikan demokrasi berkembang melalui proses pembelajaran yang terus menerus. Tanggung jawab dipengaruhi oleh faktor kesadaran siswa. Faktor yang dimaksud adalah menyadari konten dari demokrasi adalah mengetahui hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Hak siswa adalah mendapat pengajaran dari guru yang bersifat kreatif, inovatif dan menyenangkan. Sedangkan kewajiban siswa adalah belajar dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan tugas dengan rasa yang bertanggung jawab.

Meningkatnya aktivitas demokrasi yang dilakukan oleh siswa MTs Cisarua Girang Sukabumi didukung dengan lingkungan yang demokratis. Ketika siswa berhasil dalam pembinaan demokrasi dan sikap siswa yang sudah terbiasa bertanggung jawab maka terciptanya pembinaan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Cisarua Girang Sukabumi sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan rumusan kesimpulan umum tersebut diatas, maka dapat dibuat kesimpulan secara khusus yang sesuai dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Implementasi pendidikan demokrasi pada siswa MTs Cisarua Girang Sukabumi, dilakukan dengan cara pembiasaan dalam kelas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi dengan selalu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan. Selain itu siswa ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, menerapkan sikap disiplin kepada siswa, sekolah menyiapkan kotak kritik dan saran untuk siswa, Selalu melakukan pemilihan secara langsung dalam memilih ketua OSIS dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati.
2. Implementasi pendidikan demokrasi mengajarkan siswa untuk mengetahui konten dari pendidikan demokrasi yaitu mengetahui hak dan kewajiban siswa. hak siswa adalah

mendapat pengajaran yang aktif, kreatif dan inovatif dan kewajiban siswa adalah bertanggung jawab atas tugas siswa.

3. Pendidikan demokrasi melalui metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi dan bertanggung jawab.
4. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui kerjasama antar sekolah, dengan pakar-pakar pendidikan, sehingga dapat melahirkan pembinaan demokrasi yang lebih bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi,I. (2012). *Global Citizen*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budimansyah,D (2012). *Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Creswell,J (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Cholisin, dkk. (2007). *Ilmu Kewargaegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Darmawan, C. (2009). *Memahami Demokrasi Perspektif Teoritis dan Empiris*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Daryanto dan Darmiatun, S. (2013). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hakam, K. (2007). *Bunga Rampai Pendidikan Nilai*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kalidjernih, F. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara Perss.
- Kuswana, W. (2010). *Taksonomi Berfikir*. Bandung: ROSDA
- Komalasari, K. (2011). *Pembelajaran Kontekstual*. Bandung: Refika Aditama.
- Mariana,D dan Paskarina, C. (2010). *Merancang Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Bandung: AIPI
- Majid, A dan Andayani D. (2012). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Narsito.
- Rahmat, dkk. (2008). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI
- Rosyada. (2014). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Tp.
- Wahab, A dan Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winatraputra dan Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winatraputra. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Ya'qub, H. (1988). *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah*. Bandung: Diponogoro.
- Yin,Robert, K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Yusuf, Syamsu. (2007). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: ROSDA
-(2008). *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi
-(2013). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung UPI
- Jurnal:

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 3 Nomor: 1 (April: 2025) hal: 57-79

Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 2, Juli 2009. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Fitriyah (Vol. 5 No. 1 Juli-Desember 2012) *Jurnal Membangun Pembelajaran Demokratis Berwawasan Multikultural*. UIN Malang.

Matthew Gandal and Chester E. Finn, Jr. (*Democratic Teaching*) Freedom Papero.

Raihani. (2007). *Education reforms in Indonesia in the twenty-first century*. *International Education Journal*, 2007, 8(1), 172-183.

Sihono Teguh (Volume 8 No 1, april 2011). *Jurnal Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Winataputra, U.S. 1999a. *Civic Education Classroom as A Laboratory for Democracy*, Bandung: CISED Pidato Ilmiah dan Disertasi:

Pidato Penghargaan Doktor Honoris Causa Prof.H. Muhammad Nu'man Soematri, M.sc., Ed. *Mengkokohkan Dan Memperluas Spirit Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Globalisasi*.

Fachruddin. (2005). *ducating for Democracy: Ideas and Practices of Islamic Civil Society Association in Indonesia*. Dissertation at University of Pittsburgh.

Sundawa, Dadang (2010). *Disertasi Judul Membangun kecerdasan berdemokrasi warganegara melalui perwujudan kelas sebagai laboratorium demokrasi*.

Winatraputra (2001:334). *Disertasi, PPS Universitas Pendidikan Indonesia*.

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal pasal 26

Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003

Koran

PR (2014). *Guru harus jadi "Role Model" Demokrasi*. Bandung: Fikiran rakyat

Internet:

<http://asepsutisna.wordpress.com/2009/08/14/pembelajaran-demokratis-democratic-teaching/>

<http://paidjo2009.blogspot.com/2012/05/demokratisasi-pendidikan.html>

<http://lppm.ut.ac.id/htmpublikasi/21winataputra.htm>